



## Dinamika Kota Pelabuhan Parepare 1953-1965

St Maisyah Ali\*

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
 maisyahmesy@gmail.com

Abd. Rahman Hamid

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
 rahmanhamid@radenintan.ac.id

### Abstract

*This study discusses the Port City of Parepare during 1953-1965. Based on the research results using historical research by applying the steps in compiling a study; heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, it was found the development of the Port City during the DI/TII Period, especially from 1953 to 1965. The role of the Port City of Parepare during the DI/TII movement was to serve as a medium for the barter system between the DI/TII troops in power in the food commodity-producing areas in the interior and the TNI which dominated and controlled the economic cycle in the city center, namely the port as a trading port and trading entrance. In addition, the various impacts arising from the DI/TII movement on the Port City of Parepare, which was used as a place of migration by the community, has affected the mobility of the population, changes to the education system, and a drastic decline in the economic cycle. The port city of Parepare is considered as the safest place to take refuge from anarchic security threats by TII troops.*

*Keywords: Port City of Parepare, DI/TII, TNI, Barter System.*

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang dinamika Kota Pelabuhan Parepare pada 1953-1965, menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahap itu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menemukan bahwa kota pelabuhan Parepare berperan penting sebagai pusat barter antara DI/TII, yang menguasai wilayah penghasil komoditi pangan di pedalaman, dengan TNI yang mengontrol perputaran ekonomi di kota pelabuhan Parepare. Berbaksi aksi DI/TII mengakibatkan gangguan keamanan dan kenyamanan penduduk di pedalaman. Menyikapi kondisi ini, sebagian penduduk ikut DI/TII dan sebagian lagi meninggalkan kampung ke tempat yang lebih aman untuk bertahan hidup di bawah perlindungan TNI. Penduduk dari wilayah Ajattapareng, Enrekang, dan Mandar mengungsi ke Parepare. Dampaknya, aktivitas pelabuhan Parepare terganggu. juga kegiatan pendidikan, sosial, dan perekonomian penduduknya. Dengan demikian semakin kuat satu pemikiran bahwa tumbuh, kembang, dan surutnya Parepare tak lepas dari aktivitas pelabuhannya.

Kata kunci: Kota Pelabuhan Parepare, DI/TII, TNI, Sistem Barter.

### ملخص

بحثت هذه الدراسة عن ديناميكيات المدينة الساحلية باري باري باستخدام المنهج التاريخي. ومصادرها التاريخية هي الوثائق والأرشيف التاريخية وكذلك الوثائق الشفوية من نتيجة المقابلة. أشارت نتائج الدراسة إلى أن المدينة الساحلية باري باري تدور دورا مهما كمرکز مقاضية السلع والأسلحة بين دار الإسلام / الجيش الإسلامي الإندونيسي (DI/TII)

\*Corresponding author

الذي يستولي مناطق إنتاج السلع الغذائية في المناطق النائية و الجيش الوطني الإندونيسي الذي قام بمراقبة الدورات الاقتصادية في باري باري. أدت أعمال العنف العشوائية من قبل دار الإسلام / الجيش الإسلامي الإندونيسي (DI/TII) في المناطق الريفية إلى إزعاج أمن السكان حتى أخلوا بعض السكان إلى مكان أكثر أمانا ليظل على قيد الحياة تحت حماية الجيش الوطني الإندونيسي. أخلوا بعض سكان منطقة آجات بارينج، وإينريكانج، ومندار إلى باري باري. وتأثرت هذه الواقعة إلى إزعاج نشاطات ميناء باري باري. تعزز نتيجة الدراسة فكرة مهمة بأن نمو مدينة باري باري تطورها وتدهورها لا يمكن فصله من نشاطات ميناءها.

الكلمات المفتاح : ميناء، مدينة، باري باري، الجيش الإسلامي الإندونيسي، الجيش الوطني الإندونيسي

## Pendahuluan

Pada awalnya Parepare hanyalah sebuah pelabuhan alam yang digunakan oleh masyarakat setempat sebagai pelabuhan nelayan. Namun, seiring perkembangan waktu, kawasan itu tumbuh menjadi kota yang ramai dan berfungsi sebagai pusat pelayaran di pantai barat Sulawesi Selatan. Ia menjadi gerbang utama perekonomian di Indonesia Timur, setelah pelabuhan Makassar.

Nama Parepare, dalam tradisi lisan setempat, berkaitan dengan jenis tumbuh semak belukar dari pepohonan jenis bakau, yang oleh penduduk setempat disebut "*para-para*". Jenis semak "*para*" (bakau) menghiasi sepanjang bibir pantai, dari Soreang dan Bacukiki sampai di Mallusetasi (sekarang Kabupaten Barru). Dengan keadaan fisik ini, penduduk setempat menyebutnya *para-para*. Di kawasan dibuka sebuah pemukiman bernama Soreang dengan pelabuhan yang bagus. Pelabuhan ini berada di teluk dengan tepian yang sangat dalam dan terdapat pulau sebagai penghalang ombak. Pelabuhan ini terus berkembang seiring dengan kemajuan masyarakatnya, lalu berdiri sebuah kerajaan dengan istana yang megah bernama *Sao Raja MattanruE*. Istana ini menjadi pusat pemerintahan dan simbol aktivitas pelabuhan yang sangat ramai. Selain itu, juga dibuat sebuah simbol yang kelak dijadikan merek dagang dengan diikat atau digantung di tanduk istana kerajaan yang disebut "*parapara*". Kata *parapara* berubah menjadi Parepare sesuai dengan aksen Bugis.<sup>1</sup>

Pelabuhan Parepare mampu memenuhi kebutuhan kapal interinsuler, bahkan kapal-kapal asing. Dalam bidang perdagangan, kegiatan yang dilakukan antardaerah penghasil dengan pelabuhan ekspor sebagai tempat akumulasi dan pusat kegiatani industri. Hasil-hasil yang diekspor lewat pelabuhan ini merupakan produk dari pedalamannya berupa hasil pertanian, perkebunan dan peternakan. Hasil utama pertanian adalah beras, sebagai komoditi ekspor guna memenuhi kebutuhan pangan daerah-daerah di luar Sulawesi Selatan. Pada tahun 1920an dan 1930an, pelabuhan ini menjadi pintu keluar beras antarpulau, selain pelabuhan Makassar.<sup>2</sup> Peran pelabuhan Parepare terganggu pada tahun 1940-an akibat revolusi kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1950an, produksi pangan di Sulawesi Selatan terganggu akibat gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Abdul Qahhar Mudzakkar. Lahan hancur dan dibiarkan tidak ditanam. Akibatnya terjadi produksi beras pada awal 1950-an. Beras harus diimpor sejak tahun 1952. Bahkan, pada akhir 1963 dilaporkan bahwa seluruh wilayah Sulawesi

---

<sup>1</sup> Syahrir Kila, "Pelabuhan Parepare di Bawah Kuasa Gowa dan Bone", *Walasuji* 8, No. 2 (2017): h. 206.

<sup>2</sup> Herman, "Penggilingan Padi di Wilayah Parepare 1950-1965" (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), 17.

Selatan terjadi kekurangan beras.<sup>3</sup> Kendati demikian, pelabuhan Parepare tetap berperan dalam jaringan pelayaran dan perdagangan, bahkan menjadi sarana penyeludupan. Penyeludupan beras bertujuan menopang logistik perang, meliputi persenjataan, pakaian perang, dan kebutuhan pokok DI/TII dalam perang gerilya. Aksi-aksi penyeludupan berkembang pesat setelah 1950-an. Kondisi ini diperburuk dengan adanya kerjasama antara oknum TNI dan DI/TII. Mereka bermain mata memanfaatkan perdagangan gelap beras dan kopra melalui kapal-kapal yang singgah di pelabuhan Parepare.

Beberapa kajian terbaru mengenai Parepare dikerjakan oleh Syafaat Rahman Musyaqqat dan Didik Pradjoko.<sup>4</sup> Keduanya fokus pada peran pelabuhan Parepare pada masa Hindia Belanda dengan menampilkan perdagangan komoditas lokal terutama beras yang digerakan oleh jaringan kapal niaga *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM). Menurutnyam fungsi pelabuhan tersebut didukung oleh komoditas beras yang dihasilkan dari daerah sekitarnya terutama wilayah Ajattapareng. Pada masa itu, Sulawesi Selatan merupakan daerah penyuplai utama beras di luar Pulau Jawa bagi Timur Besar (*Groote Oost*) yang ke luar melalui pelabuhan Parepare dan Makassar. Dalam konteks ini, pelabuhan Parepare berperan dalam jaringan perdagangan intra-regional dan inter-regional. Kajian Adil Akba<sup>5</sup> memfokuskan pada dinamika perdagangan beras dan penyeludupan pada dekade pertama kemerdekaan (1946-1956). Menurutnya, gejolak politik di Sulawesi Selatan mempengaruhi produksi dan perdagangan beras lewat praktek-praktek penyulundupan. Secara bernilai ekonomis, beras juga menciptakan jejaring ekonomi dan memiliki nilai politik.

Kajian tersebut memberikan arah untuk kajian lebih lanjut lewat studi ini yang mencoba menjelaskan mengenai peran Pelabuhan Parepare pada Masa DI/TII? Apa dampak yang ditimbulkan oleh gerakan DI/TII dan penumpasan gerakan itu oleh TNI terhadap dinamika Kota Pelabuhan Parepare? Studi bertolak dari pemikiran bahwa Parepare merupakan sebuah kota di pantai barat Sulawesi yang hidup dari aktivitas pelabuhannya. Karena itu, dalam studi ini digunakan istilah “kota pelabuhan”. Dalam konteks ini, hidup dan matinya kota tersebut sangat ditentukan oleh peran/fungsi pelabuhannya. Fungsi pelabuhan tak lepas dari faktor keamanan. Apabila kondisi keamanan baik, maka aktivitas pelabuhan pun dapat berjalan baik. Begitu pula sebaliknya, aktivitas pelabuhan terganggu bila keamanan di pelabuhan dan sekitarnya terganggu.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap. *Pertama*, heuristik yakni pengumpulan sumber tulisan yang diperoleh dari arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Selain itu, sumber lisan diperoleh melalui wawancara dengan para pelaku sejarah di Kota Parepare, seperti H. Olleng (70 tahun) dan Alimuddin (68 tahun). Untuk memperkaya

---

<sup>3</sup> Cornelis Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), 360.

<sup>4</sup> Syafaat Rahman Musyaqqat, “Jaringan Perdagangan Beras dan Dinamika Pelabuhan Ekspor di Sulawesi Selatan pada 1930-an”, *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya* 4, no 2 (2021): 113–39; Syafaat Rahman Musyaqqat en Didik Pradjoko, “The Role of Parepare Port in Trading and Shipping of Rice Commodities in South Sulawesi, 1930– 1942”, *Journal of Maritime Studies and National Integration* 4, no 2 (2020): 115–26.

<sup>5</sup> Adil Akbar, “Berre’ri Sulawesi Maniang: Dari Produksi, Perdagangan, Pelayaran, Hingga Penyelundupan Beras (1946-1956),” *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2019).

data dan analisa studi ini digunakan pula kajian-kajian terdahulu yang relevan. *Kedua*, setelah mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah kritik sumber untuk menemukan keautentikan dan kredibilitas sumber sejarah. *Ketiga*, interpretasi yakni penafsiran terhadap fakta yang diperoleh dari sumber sejarah. *Keempat*, historiografi yakni penyusunan fakta sejarah menjadi suatu kisah secara kronologis, kausalitas, dan imajinatif.

## **Pembahasan**

### **A. Peran Pelabuhan**

Dalam dunia pelayaran niaga, interaksi kadang menimbulkan peperangan dan juga pesekutuan dan persahabatan. Hubungan dagang didorong oleh kebutuhan masing-masing akan bahan pokok yang tidak diproduksi sendiri. Ambil contoh, penduduk pedalaman memerlukan ikan dari penduduk pantai, sedangkan penduduk pantai membutuhkan hasil hutan dari penduduk pedalaman. Dalam perdagangan antarpulau, pelaksanaan hubungan tersebut membutuhkan kemampuan berlayar, baik kemahiran membuat perahu atau kapal sebagai angkutan maupun pengetahuan navigasi untuk mencapai tujuan.<sup>6</sup> Gangguan keamanan akibat gerakan DI/TII pada 1950an dan 1960an membawa pengaruh besar terhadap dinamika perdagangan komoditi dan aktivitas pelabuhan Parepare.

#### **1. Penyeludupan Komoditi**

Pelabuhan Parepare merupakan bandar niaga dan pengangkutan beras dari hasil produksi wilayah Sulawesi Selatan ke beberapa pelabuhan yang ada di Sulawesi lainnya, yakni Palopo, Selayar, Balanipa, Siwa, Majene, Mamuju, Bantaeng, Watampone, Salomekko, Kolaka, Bau-bau, Raha dan Kendari. Bahkan pengangkutan hasil pertanian dan produksi ini diangkut ke pelabuhan di luar Sulawesi, seperti Maluku, Kalimantan Timur hingga ke luar negeri. Pada tahun 1904, KPM membuka jaringan pelayaran nomor 22 dengan menghubungkan jalur pelayaran Makassar-Teluk Bone-Kepulauan Selayar.

Kendati monopoli Hindia Belanda telah lepas dari Tanah Air, namun pelayaran dan perdagangannya masih aktif dengan berbagai pengangkutan hasil produksi Sulawesi, bahkan diekspor melalui jalur pelayaran internasional. Pada tahun 1946, beras diespor ke India yang pada masa itu ditimpa bencana kelaparan. Dalam hal ini membuktikan bahwa Indonesia pada umumnya dan Sulawesi secara khususnya mampu menembus blockade perekonomian yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda pada masa meruncingkan kukunya kembali sebelum Indonesia berdaulat secara keseluruhan melalui jaringan pelayaran. Sejalan dengan ini bahwa diplomasi beras melalui jaringan pelayaran sedikit banyak mampu memberikan pesan pada dunia dalam mengakui eksistensi kehadiran negara yang baru merdeka.

Antara tahun 1946 sampai 1948, Sulawesi Selatan memproduksi beras 982,15 kuintal per hektar dengan luas areal persawahan 372.864 hektar. Produksi beras yang melimpah ini, selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, juga diperdagangkan ke luar daerah. Pada tahun 1946-1949 terdapat 1.118 kapal bongkar muat di pelabuhan Makassar dengan beban tonase 9.394.620,23 kubik. Kemudian 2.652 perahu tradisional dengan total tonase 97.944,85 kubik hilir mudik di pelabuhan Makassar. Aktivitas ini memberikan dampak terhadap perekonomian dari aspek ekspor-impor perdagangan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Adrian Bernard Lopian, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi abad XIX* (Depok: Komunitas Bambu, 2009), 80.

<sup>7</sup> Akbar, "Berre'ri Sulawesi Maniang: dari Produksi, Perdagangan, Pelayaran, hingga Penyelundupan Beras (1946-1956)", 148.

Kehadiran perusahaan *Mandeers, Seeman & Co*, Perusahaan Insulinde Makassar, *Moreoux & Co*, *Coprafound*s ikut andil dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia Timur terutama komoditas beras, kopra, dan kayu melalui pelabuhan Makassar, baik menggunakan jasa KPM maupun perahu lokal. Dalam kurun waktu 1955-1956, transaksi perdagangan beras di Sulawesi Selatan semakin naik dengan mengirim barang ke Kalimantan dan Ambon. Pada masa ini, Parepare memiliki persediaan beras sebanyak 100 ton yang dikontrol langsung oleh militer di pelabuhan Parepare.<sup>8</sup>

Pada tahun 1957, aktivitas Pelabuhan Parepare mengalami kemerosotan yang sangat pesat. Semua kegiatan bongkar muat barang, bahkan ekspor dan impor luar negeri terancam berhenti. Ini disebabkan karena kantor KPM di Pelabuhan Parepare ditutup pada 1 April. Para pedagang, baik lokal maupun internasional, tidak lagi singgah di sana karena sudah tidak ada barang yang dapat diangkut. Peneutupan kantor KPM menjadi tanda bahwa keuntungan tidak lagi diperoleh, seperti masa sebelumnya. Akibatnya 16 karyawan KPM, termasuk kepala kantornya, dipecat.<sup>9</sup>

Penutupan kantor ini adalah bagian dari campur tangan DI/TII yang saat itu gencar melakukan penyeludupan sumber pangan sebagai komoditas dagang. Dengan menguasai wilayah Ajatappareng, wilayah utama penghasil beras di pantai barat Sulawesi, mereka mampu mengendalikan sumber pangan untuk menunjang ransum dan logistik gerakannya yang keluar melalui pelabuhan Parepare.

## 2. Sarana Barter Senjata

Setelah Qahhar Mudzakkar menyatakan diri bergabung dengan DI/TII pimpinan SM. Kartosuwirjo pada 27 Dzulhijjah 1372 (7 Agustus 1953),<sup>10</sup> situasi semakin memanas antara TNI dan DI/TII. Kondisi ini berpengaruh terhadap perekonomian dari kedua belah pihak, sebab tidak menentunya sumber dana untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Pihak DI/TII membutuhkan materi dalam jumlah banyak untuk menggerakkan ribuan pasukan masuk ke hutan belantara. Maka dengan semangat juang, rencana menguasai wilayah penghasil beras dan kopra terealisasikan, walaupun disinyalir terdapat operasi bersifat separatis dan anarkis kepada rakyat. Dengan menguasai daerah produksi komoditas, DI/TII dapat menjalankan perekonomian di bawah Contact Post (CP). Badan ini dibagi tiga yaitu CP I Mamuju, CP II Bulukumba, dan CP III Lampesue Towoti.<sup>11</sup> Selain berdagang, CP juga mengatur perdagangan antar daerah-daerah penghasil komoditi pangan di Selat Makassar dan Teluk Bone. Kelihaihan SP mengatur perdagangan membuat DI/TII memiliki kekuatan ekonomi di Sulawesi Selatan, bahkan dapat memblokir perekonomian pemerintah RI.

Petani cenderung menjual hasil pertaniannya kepada DI/TII dibandingkan kepada pedagang pemerintah. Pasukan TII merupakan bekas KGSS. Mereka paham betul mengenai budaya orang Sulawesi Selatan, dibandingkan pasukan TNI dari Jawa. Dalam hal ini, masyarakat tidak senang dengan pasukan TNI, bahkan mereka ingin melawan TNI tetapi tidak memiliki kekuatan. Itulah sebabnya masyarakat ikut DI/TII bergerilya dan sebagian membantu kebutuhan logistik dan gerilya.<sup>12</sup>

Menyikapi kondisi itu, TNI berupaya mengimbangi dan memulihkan perekonomian operasi yang gencar dilakukan oleh TII. Panglima Angkatan Darat Teritorium VII

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Anonim, "KPM-kantoor in Pare-pare gaat sluiten", *Het Nieuwsblad voor Sumatra*, 18 Maret 1957; 1.

<sup>10</sup> ArsipProvinsi Sulawesi 1950-1960; No. Register 332.b.

<sup>11</sup> Ahmad Subair, "Jaringan Perdagangan Senjata pada Masa gerakan DI/TII Sulawesi Selatan Tahun 1950-1965" (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018), 81.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ahmad Rasyid Amberi Said, Mangkoso, 7 Februari 2020.

menegaskan agar TNI mengontrol langsung perdagangan hasil bumi. Upaya itu senada arahan Kepala Staf Angkatan Darat, A.H. Nasution, kepada seluruh Panglima Teritorium agar mandiri memperoleh pendanaan dalam mengembangkan wilayah teritorium masing-masing. Atas dasar itu, dibentuk sebuah lembaga Opsir Pekerja Istimewa X Teritorium VII (OPI. X. TT. VII) yang dipromotori Mayor Saleh Lahade pada tahun 1955-1956 dengan tugas mengawasi secara langsung produksi dan perdagangan hasil bumi terutama beras dan kopra. Dengan demikian, maka perlu izin dari militer untuk pengangkutan hasil bumi ke berbagai wilayah guna menghindari penyeludupan. Aturan ini tidak berjalan lancar, karena petinggi militer sendiri memberi izin untuk aksi perdagangan gelap.<sup>13</sup>

Andi Selle dan Andi Sose, sebagai penguasa perang TNI, dahulu merupakan bekas komandan CTN mulai menunjukkan eksistensinya di Parepare dan Polewali Mandar. Wilayah ini merupakan sumber senjata dan persediaan yang sangat baik, sebab selalu bersedia menjual persenjataan kepada penawar tertinggi. Bahkan dengan hanya sistem barter pun tidak menjadi masalah selama mendapatkan keuntungan dalam kesepakatan. Qahhar Mudzakkar melakukan konsolidasi tertutup dan berhasil membuat kesepakatan teritorial dan perdagangan dengan kedua tokoh tersebut. Dengan demikian operasi setempat tidak akan dilakukan terhadap dirinya dan pasukan DI/TII di kawasan itu. Menurut Anhar Gonggong,<sup>14</sup> hubungan Andi Selle dengan Qahhar Mudzakkar bukanlah hubungan politis dan ideologi, melainkan hanya hubungan dagang. Bahan mentah sebagai pangan dikirim oleh Qahhar Mudzakkar kepada Andi Selle lalu dibayar peluru, berbagai senjata, dan pakaian perang.<sup>15</sup>

Daerah penyeludupan DI/TII hampir seluruh pesisir Sulawesi Selatan. Mandar dan daerah sekitar Pulau Menui (Sulawesi Tengah-Tenggara) sering dijadikan tempat pendaratan senjata dari luar Sulawesi. Mandar memiliki dua rute dalam penyeludupan senjata yang menghubungkan Selat Makassar. Rute pertama di daerah pesisir Sulawesi Selatan, seperti Parepare, Mandar, Donggala, Kalimantan, dan Malaysia. Rute kedua menyusuri pesisir barat Sulawesi sampai ke utara, kemudian ke timur sampai Filipina.<sup>16</sup> Senjata yang masuk melalui Mandar bermacam-macam yaitu *owen*, *bren*, *sten*, dan *karabin*. Senjata tersebut mendarat melalui pelabuhan-pelabuhan di luar wilayah kekuasaan TNI, antara Pambauang dan Mamuju. Berdasarkan bahwa senjata tersebut di bawah oleh PuaHabo yang tinggal di Galung dekat kota Mandar lalu didistribusikan ke markas DI/TII menggunakan perahu dari Kampong Pangale menuju beberapa pelabuhan, termasuk Pelabuhan Parepare.<sup>17</sup>

Pelabuhan Parepare merupakan pelabuhan lama yang dijadikan tempat penyeludupan. Ia berdekatan dengan daerah penghasil kopra di Mandar. Hal ini mempermudah hubungan dengan Kalimantan, Tawao, dan Singapura dalam perdagangan gelap. Guna mempermudah perdagangan gelap maka dibuat sandi atau kode rahasia yang tidak banyak diketahui saat itu. Misalnya, lokasi DI/TII diberi tanda dengan membentangkan kain menyerupai bendera kecil. Ada juga kode untuk

---

<sup>13</sup> Adil Akbar, "Perdagangan Beras Di Sulawesi Selatan 1947-1956" (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2016), 5-6.

<sup>14</sup> Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot hingga Pemberontak* (Yogyakarta: Ombak, 2004).

<sup>15</sup> Akbar, "Perdagangan Beras di Sulawesi Selatan 1947-1956", 63.

<sup>16</sup> Subair, "Jaringan Perdagangan Senjata pada Masa gerakan DI/TII Sulawesi Selatan Tahun 1950-1965", 94.

<sup>17</sup> Arsip Rahasia Sulawesi Reg. 526

penyeludupan dan pengantaran surat-surat rahasia, seperti tanda *flash light* dengan pola panjang dan pendek di malam hari.<sup>18</sup>

Andi Rifai, Komandan R1-23 di Parepare tahun 1957, tidak menentang transaksi perdagangan senjata kepada DI/TII. Anggota TNI juga berjiwa dagang juga menyewakan senjata mereka kepada gerilyawan selama sehari-hari bahkan perpekan. Senjata itu diambil kembali oleh anggota TNI ketika dibutuhkan dengan transaksi tertutup bersama pihak DI/TII. Keluarga dan kerabat di kota juga membantu dalam hal mengirim makanan, kain, obat-obatan, dan logistik lainnya dalam memenuhi kebutuhan operasi di pedalaman. Qahhar Mudzakkar mendapat bantuan dari luar negeri melalui kapal selam misterius yang muncul di Teluk Bone yang merupakan kontak dengan Duta besar DI Hasan Tiro di Amerika Serikat atas janji bantuan dari Inggris. Keterlibatan negara asing adalah kesediaan para pejabat Inggris di Tawao dan Kalimantan Utara (Sabah) dalam mengabaikan penyeludupan secara besar-besaran yang berlangsung di depan matanya.<sup>19</sup>

Hubungan gelap antara TNI dan DI/TII terjalin mesra secara simbiosis mutualiasme dalam operasi masing-masing. Kondisi ini menjadu satu sebab gerakan DI/TII dapat berlangsung cukup lama dan sulit dibasmi. Di satu sisi, kedua belah pihak memiliki misi untuk saling menyerang dan menjatuhkan basis masing-masing, tetapi pada lain sisi mereka juga saling membantu dalam urusan pertahanan. Menurut keterangan seorang saksi mata di Parepare, bahwa kedua pihak memiliki hubungan kekerabatan, tetapi saling menyerang. Karena itu masyarakat bingung dan mempertanyakan apa misi sesungguhnya dari gerakan tersebut.<sup>20</sup>

Perdagangan gelap tersebut kemudian diketahui oleh pemerintah pusat. Kolonel Andi Muh. Yusuf, Panglima KDM Sulawesi Selatan Tenggara, mengadakan operasi penumpasan terhadap Andi Selle dan Andi Sose. Akibatnya, suplai persenjataan dan logistik perang pun terhenti. Kekuatan DI/TII melemah dan tidak mampu menghadapi kekuatan TNI. Apalagi penumpasan ini melibatkan semua matra, sehingga pasukan operasi pun bukan penduduk lokal Sulawesi Selatan yang memiliki hubungan dengan DI/TII. Pada 3 Februari 1965, Qahhar Mudzakkar dilumpuhkan dan tertembak mati di Sungai Lasolo, Sulawesi Tenggara.

## B. Dampak Gerakan DI/TII

Gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh gerakan DI/TII mengakibatkan banyak wilayah sekitar Kota Parepare menjadi tidak aman, sehingga para penduduk yang merasakan langsung dampak operasi ini terpaksa meninggalkan daerahnya. Mereka mencari tempat yang jauh lebih aman sebagai pilihan terbaik untuk bisa bertahan hidup. Kota Parepare digunakan sebagai markas Resimen Infantri Andi Sose. Dalam membalas surat rahasia 1 Agustus 1953, No. PemX III/16/29 yang disampaikan Kepala Daerah Parepare bahwa akan dibangun sebuah pos-pos tentara agar dapat melaksanakan berbagai operasi, seperti operasi militer, operasi politik, dan operasi ekonomi.<sup>21</sup> Kota Parepare hampir tidak tersentuh oleh operasi DI/TII. Penduduk yang merasa terancam akibat aksi DI/TII pun bermigrasi ke Kota Parepare.

<sup>18</sup> Arsip Rahasia Saleh Lahade Reg. 188.

<sup>19</sup> Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar: dari tradisi ke DI/TII* (Grafitipers, 1989), 207.

<sup>20</sup> Wawancara dengan H. Olleng (usia 70 tahun), orang yang menyaksikan dan merasakan dampak DI/TII di Parepare, 6 Februari 2020.

<sup>21</sup> Arsip Provinsi Sulawesi 1950-1960, Reg. 332b.

Kota Parepare sebagai pusat *Afdeling* Ajatappareng menjadikannya pusat semua aktivitas pemerintahan, sehingga keamanan daerah ini lebih diprioritaskan daripada daerah lain. Tentara yang datang dari Makassar dan Jawa dipusatkan di Kota Parepare, sebelum ditempatkan ke daerah-daerah basis pergerakan DI/TII. Kondisi keamanan kota ini lebih terjamin dan menjanjikan, kendati keadaan di seluruh wilayahnya tidak bisa digolongkan sebagai daerah yang bebas gangguan keamanan. Pada beberapa tempat di Parepare terdapat daerah yang bisa masuk sarang para perampok. Hal ini dapat diketahui dari keterangan Hasankuraga berikut bahwa:

Ketika saya pertama kali datang di Kota Parepare sekitar tahun 57, keadaannya jauh sekali dengan keadaan sekarang. Keadaan dulu Kota Parepare masih sebagian besar adalah daerah yang tidak berpenghuni terutama di daerah-daerah perbukitan. Daerah yang ramai hanyalah daerah di sekitar Lakessi dan pelabuhan sehingga masih banyak daerah Kota Parepare yang masih tidak aman, masih sering terjadi perampokan yang dilakukan terutama orang-orang berasal dari gunung. Tapi semuanya itu jarang terjadi, itupun hanya terjadi pada daerah-daerah pinggiran Kota Parepare yang penduduknya masih sedikit.<sup>22</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Alimuddin (68 tahun),<sup>23</sup> bahwa pada tahun 1950an sering terjadi penculikan dan perampokan di Parepare. Aksi itu dilakukan oleh sekelompok orang yang berasal dari gunung pada malam hari. Mereka sering menculik anak-anak dengan meminta tebusan uang. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka anak tersebut dibunuh. Masyarakat pun selalu berjaga-jaga dari ancaman perompak. Kendati demikian, Kota Parepare lebih memberikan rasa aman dibandingkan dengan daerah lain, karena kota ini dikuasai oleh TNI. Karena itulah, gerilyawan DI/TII tidak berani beraksi di dalam Kota Parepare.

### 1. Kepadatan Penduduk

Salah satu dampak operasi DI/TII ialah perpindahan penduduk. Masyarakat yang merasakan kerugian dan kesengsaraan akibat gerakan ini di kampungnya pindah ke Kota Parepare, antara lain dari daerah Enrekang. Daerah ini merupakan salah satu basis DI/TII. Wilayah dengan pegunungan yang dipenuhi hutan-hutan menarik dijadikan basis para gerombolan. Berbagai kerusakan dan kekerasan yang dilakukan oleh gerombolan membuat masyarakat terpaksa meninggalkan kampung. Pemerintah sipil dan pelajar pun merasakan dampaknya. Mereka pindah ke Kota Parepare untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan.<sup>24</sup>

Daerah lain yang menjadi basis DI/TII adalah Mamuju. Dampak yang sama dirasakan oleh masyarakat setempat sehingga terpaksa hijrah ke tempat yang lebih aman. Warta Politik Daerah Mandar<sup>25</sup> dan kesaksiaan Muh. Jamal, alias Alitong (mantan Komandan Peleton IV DI/TII wilayah Mamuju),<sup>26</sup> menyebutkan bahwa penduduk Mamuju dan sekitarnya hijrah dari gangguan keamanan dan ketertiban akibat operasi DI/TII. Setiap tahun penduduk hijrah ke daerah-daerah yang lebih aman, meninggalkan tempat tinggal, ladang, kebun persawahan, ternak, dan harta benda yang habis terbakar.

---

<sup>22</sup> Muhammad Said, *Migrasi Orang Enrekang ke Parepare 1950-1965* (Parepare: Sampan Institute, 2019), 46.

<sup>23</sup> Wawancara di Parepare, 6 Februari 2020.

<sup>24</sup> Said, *Migrasi Orang Enrekang ke Parepare 1950-1965*, 44.

<sup>25</sup> Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, Reg. 233.

<sup>26</sup> Aco Fikram, "Aktivitas DI/TII dan Dampaknya terhadap Kehidupan Masyarakat Mamuju 1953-1956" (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), 92.

Daerah yang menjadi tujuan mereka adalah Bontang (Kalimantan Timur), Kota Baru (Kalimantan Selatan), Ujung Lero (Kota Parepare, Sulawesi Selatan), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Donggala (Sulawesi Tengah).

Perpindahan penduduk ke Kota Parepare menimbulkan penambahan signifikan jumlah penduduk setiap tahun. Ambil contoh pada tahun 1960, jumlah penduduk hanya 66.954 jiwa. Tujuh tahun kemudian bertambah menjadi 67.992 jiwa. Jumlahnya terus bertambah. Pada tahun 1968 telah mencapai 70.526 jiwa.<sup>27</sup> Penambahan ini merupakan akibat gerakan DI/TII, karena saat itu Kota Parepare merupakan tempat paling aman, selain Kota Makassar.

## 2. Pendidikan

Aksi DI/TII bukan hanya di bidang politik dan ekonomi, tetapi juga pendidikan menjadi prioritas pengembangan intelektual dan spiritual TII. Mengenai pendidikan pada masa DI/TII, aktor yang berperan penting adalah seorang ulama terkemuka yakni KH. Abdur Rahman Ambo Dalle. Dalam *Misykat*,<sup>28</sup> media informasi, edukasi, dan silaturahmi keluarga besar Pondok Pesantren DDI Mangkoso, disebutkan bahwa ia mengajarkan kepada pasukan TII mengenai akhlak dan tauhid. Selain bidang keagamaan, mereka juga diajarkan tentang bahasa. Bahasa Indonesia diajarkan oleh Mustamin dan bahasa Arab oleh Naim.

Kehadiran Ambo Dalle di tengah-tengah mereka telah lama dinantikan oleh Qahhar Mudzakar. Lalu dibentuk Dewan Haq Revolusi dengan ketuanya adalah Ambo Dalle. Ada dua kewajiban yang dipegang teguh oleh beliau, yaitu melakukan penilaian, penyelidikan, dan pengawasan atas segala amal perbuatan pejabat-pejabat revolusi yang bertentangan dengan ajaran Islam (Al-Quran dan hadis shahih). Kewajiban lainnya ialah membahas kitab suci Al-Quran dan hadis shahih secara populer dan revolusioner yang menjadi pedoman dan pegangan bagi Pimpinan Revolusi Dunia Islam dalam melaksanakan amanah kedaulatan hukum Tuhan.

Di lain sisi, dinamika pendidikan di Kota Parepare digambarkan dengan dibentuknya inspeksi Sekolah Dasar pada tahun 1951. Inspeksi ini dikepalai oleh kepala sekolah rakyat yang mengurus pendidikan di wilayah Barru, Pinrang, Sidenreng Rappang, dan Parepare. Pada tahun yang sama dibentuk KPKB yang merupakan kursus pengantar kewajiban belajar untuk menunjang pendidikan di Parepare hingga terdapat harapan dan udara segar dalam dunia pendidikan karena telah dibentuk pendidikan taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi negeri maupun swasta oleh pemerintah setempat.

## 3. Perekonomian

Kota Parepare dikenal sangat ramai dan strategis dengan adanya pelabuhan di garis silang perdagangan laut dan darat. Dengan posisi strategis ini, ia mampu memberi sumbangsih terhadap perekonomian yang lebih maju bagi Sulawesi Selatan. Potensi pelabuhannya menyebabkan banyak orang ingin mendudukinya, karena dapat menguntungkan secara ekonomis. Pada masa kolonial, perusahaan pelayaran niaga Hindia Belanda yakni KPM berhasil merebut dan memosisikan dirinya untuk mendominasi pelabuhan Parepare. Namun, kesuksesan itu pudar dengan ditutupnya KPM pada 1 April 1957, karena campur tangan pihak DI/TII.

Pasukan DI/TII gencar melakukan penyeludupan bahan pangan terutama beras dari wilayah Ajattappareng. Dengan menguasai Ajattappareng, DI/TII dapat

<sup>27</sup> Suriati Hatta, "Kota Parepare 1960-2022 Suatu Tinjauan Sejarah Kota" (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2005), 97.

<sup>28</sup> Ahmad Rasyid Amberi Said, "8 Tahun Bersama DI/TII," *Misykat*, 2012, 12-13.

mengendalikan sumber pangan yang menunjang samsun TII dan logistik perang. Aktivitas pelabuhan Parepare mengalami kemerosotan pesat. Segala bentuk kegiatan bongkar muat barang, bahkan ekspor dan impor terancam berhenti. Para pedagang lokal dan aupun internasional tidak lagi singgah di sana karena tidak ada barang yang diangkut dari pelabuhan tersebut.

Sebelum masa kekacauan, daerah Sulawesi Selatan dikenal sebagai penghasil beras yang mampu meningkatkan perekonomian lokal dan regional Indonesia Timur. Namun, pada masa pemberontakan DI/TII, Sulawesi Selatan mengalami kekurangan beras, bahkan sempat mengimpor beras pada tahun 1963 dan 1964 untuk mengatasi kekurangan tersebut. Kondisi ini disebabkan banyaknya areal tanah yang tidak digarap akibat gangguan keamanan yang mengakibatkan penduduknya pergi. Faktor lain adalah kegiatan penyelundupan beras dari Pelabuhan Parepare ke luar daerah Sulawesi Selatan yang berlangsung lama membuat stok beras untuk kebutuhan lokal terganggu.

Menyikapi kondisi tersebut, Walikota Parepare Andi Mannaungi membuat pencaanangan dan kebijakan untuk mencegah stabilitas beras agar perekonomian dapat dikendalikan. *Pertama*, larangan beras keluar daerah karena semakin menipisnya ketersediaan beras di wilayah Parepare. *Kedua*, mengatur pasokan beras kepada pegawai negeri. *Ketiga*, memberikan kewenangan kepada para pedagang membeli padi/gabah/beras di daerah lain seperti Sidrap, Barru, Pinrang, Soppeng, dan Wajo. *Keempat*, memberikan lisensi kepada perusahaan penggilingan karena kurangnya penggilingan di Parepare; dan *Kelima*, menjadikan Parepare sebagai kota industri.<sup>29</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa peran kota pelabuhan Parepare sangat penting di masa pergolakan dan gangguan keamanan Sulawesi Selatan pada 1950 – 1960an. Ia menjadi satu pusat jaringan perdagangan gelap (penyelundupan) DI/TII bekerjasama dengan TNI. Pihak pertama (DI/TII) menguasai daerah pedalaman dengan semua potensi sumber daya alamnya terutama beras dari wilayah Ajattapareng. Sementara pihak kedua (TNI) menguasai daerah pesisir, khususnya Kota Pelabuhan Parepare. Masing-masing saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Pada kondisi inilah terjalin hubungan gelap yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang berimplikasi terhadap dinamika Kota Pelabuhan Parepare, sebagai tempat barter kebutuhan DI/TII dan TNI.

Kota Parepare juga menjadi tempat utama tujuan hijrah, setelah Kota Makassar, bagi penduduk dari luar kota yang mengalami gangguan keamanan akibat aksi DI/TII dan operasi pemulihan keamanan oleh TNI, antara lain dari daerah Enrekang dan Mandar. Hal ini mempengaruhi kepadatan penduduk, perubahan sistem pendidikan, dan perekonomian menurun drastis akibat terganggunya aktivitas pelabuhan Parepare. Fakta ini meneguhkan satu pandangan bahwa Parepare, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di pantai barat Sulawesi, merupakan kota yang lahir, berkembang, dan merosot dari aktivitas pelabuhannya. Inilah makna dari sebuah kota pelabuhan yang menjadi fokus kajian ini.

## Daftar Acuan

- Akbar, Adil. "Berre'ri Sulawesi Maniang: dari Produksi, Perdagangan, Pelayaran, hingga Penyelundupan Beras (1946-1956)". *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, no 1 (2019): 146–61.
- . "Perdagangan Beras di Sulawesi Selatan 1947-1956". Makassar: Universitas

---

<sup>29</sup>Herman, "Penggilingan Padi di Wilayah Parepare 1950-1965", 24.

- Negeri Makassar, 2016.
- Dijk, Cornelis Van. *Darul Islam: sebuah pemberontakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Fikram, Aco. "Aktivitas DI/TII dan Dampaknya terhadap Kehidupan Masyarakat Mamuju 1953-1956". Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Gonggong, Anhar. *Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot hingga Pemberontak*. Yogyakarta: Ombak, 2004.
- Harvey, Barbara Sillars. *Pemberontakan Kahar Muzakkar: dari tradisi ke DI/TII*. Grafitipers, 1989.
- Hatta, Suriati. "Kota Parepare 1960-2022 Suatu Tinjauan Sejarah Kota". Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2005.
- Herman. "Penggilingan Padi di Wilayah Parepare 1950-1965". Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.
- Lapian, Adrian Bernard. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi abad XIX*. Depok: Komunitas Bambu, 2009.
- Musyaqqat, Syafaat Rahman. "Jaringan Perdagangan Beras dan Dinamika Pelabuhan Ekspor di Sulawesi Selatan pada 1930-an". *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya* 4, no 2 (2021): 113-39.
- Musyaqqat, Syafaat Rahman, en Didik Pradjoko. "The Role of Parepare Port in Trading and Shipping of Rice Commodities in South Sulawesi, 1930- 1942". *Journal of Maritime Studies and National Integration* 4, no 2 (2020): 115-26.
- Said, Ahmad Rasyid Amberi. "8 Tahun Bersama DI/TII". *Misykat*, 2012.
- Said, Muhammad. *Migrasi Orang Enrekang ke Parepare 1950-1965*. Parepare: Sampan Institute, 2019.
- Subair, Ahmad. "Jaringan Perdagangan Senjata pada Masa gerakan DI/TII Sulawesi Selatan Tahun 1950-1965". Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018.